

# Mengatasi Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Melalui Program Pendidikan Kecakapan Kerja Untuk Mencegah Pengangguran: Studi Fenomenologi

Rahmadieni Gunawan\*<sup>1</sup>, Lina Aryani<sup>2</sup>, Rachmat Ramdani<sup>3</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.384>

\*Correspondence: Rahmadieni

Gunawan

Email: [rahmadienigunawan@gmail.com](mailto:rahmadienigunawan@gmail.com)

Received: 01-02-2026

Accepted: 25-03-2026

Published: 30-03-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna dan pengalaman para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) sebagai upaya mengatasi Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (ATS) dan mencegah pengangguran dengan menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena tersebut dari perspektif partisipan. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara fenomenologis dengan 3 kelompok aktor utama: Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), dan peserta program PKK. Analisis data dilakukan melalui tahapan fenomenologis Moustakas yang dimodifikasi berdasarkan metode van Kaam dengan pendekatan teori yang digunakan adalah Teori Identitas, Teori Agensi Sosial, dan Konsep Efikasi Diri. Hasil studi menunjukkan bahwa Identitas Dinas Pendidikan Kota Bekasi diwujudkan sebagai unsur pembina yang memverifikasi kelayakan LKP dan melakukan sosialisasi, mencerminkan tanggung jawab pemerintah di sektor Pendidikan. LKP yang berperan sebagai Agensi Sosial, menghasilkan dampak positif melalui peningkatan keterampilan dan kepercayaan diri peserta, yang terwujud dalam agensi dampak, agensi bersama (dengan DUDIKA), dan agensi konteks sosial belajar yang suportif. Efikasi Diri peserta terbentuk kuat dari empat sumber Bandura, terutama melalui *Performance Accomplishments* atau keberhasilan praktik langsung yang didukung oleh *Vicarious Experience* (pengamatan), *Verbal*

*Persuasion* (motivasi instruktur), dan *Physiological information: Emotional & Physiological States* (suasana kelas yang nyaman). Meskipun LKP menghadapi tantangan ketidakpastian jadwal program, rendahnya komitmen Sebagian peserta dan tuntutan penyerapan kerja yang tidak realistis, Program PKK secara keseluruhan berhasil dalam meningkatkan kompetensi teknis dan membuka peluang karir bagi ATS.

**Keywords:** Anak Tidak Sekolah (ATS), Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), Efikasi Diri, Agensi Sosial.

**Abstract:** This study aims to analyze the meaning and experiences of actors involved in the implementation of the Skills Development Program (Program Pendidikan Kecakapan Kerja) as a government effort to address dropouts (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah) and prevent unemployment. Using a qualitative design with a phenomenological approach, the research focuses on an in-depth understanding of the phenomenon from the participants' perspectives. Data was collected through phenomenological interviews with three main actor groups: the Bekasi City Education Agency, Skills Development Center (LKP), and PKK program participants. Data analysis was conducted using Moustakas' phenomenological stages, modified based on the van Kaam method, with theoretical approaches including Identity Theory, Social Agency Theory, and the Concept of Self-Efficacy. The study results show that the Identity of the Bekasi City Education Agency is manifested as the fostering element (unsur pembina), verifying the LKP's eligibility and conducting socialization, reflecting the government's responsibility in the education sector. LKP, acting as a Social Agency, generates positive impacts through increased participant skills and confidence. This is realized through the agency of impact, joint agency (with

*DUDIKA/the work industry), and the agency of a supportive social learning context. The participants' Self-Efficacy is strongly developed from Bandura's four sources, primarily through Mastery Experiences (direct practical success), supported by Vicarious Experience (observation), Verbal Persuasion (instructor motivation), and Physiological information: Emotional & Physiological States (a comfortable class atmosphere). Although the LKP faces challenges of program schedule uncertainty, low commitment from some participants, and unrealistic job placement demands, the PKK Program is overall successful in enhancing technical competency and opening career opportunities for dropouts.*

**Keywords:** Dropouts (ATS), Skills Development Program (PKK), Self-Efficacy, Social Agency

## **Pendahuluan**

Mengutip dari Ludger Woessmann dalam *The Economic Case for Education*, mengatakan bahwa mengabaikan dimensi ekonomi dari pendidikan akan membahayakan kesejahteraan generasi mendatang, dengan dampak luas pada kemiskinan, pengucilan sosial, dan keberlanjutan sistem jaminan sosial (Grant, 2017).

Pendidikan adalah kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Tanpa pendidikan yang berkualitas, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak akan tercapai. Sistem pendidikan yang baik dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan masyarakat, dan memberi dampak positif bagi keluarga maupun negara. Data menunjukkan adanya hubungan erat antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi (GDP) (Kuwar, 2021)

Hal serupa juga dikatakan oleh Payos (2010) dalam jurnal yang berjudul *Evaluation of the Performance of the Technical Education and Skills Development Authority (Tesda) Training Institutions in Region VIII*, Ia mengatakan bahwa setiap negara penting untuk memaksimalkan sumber daya manusia dengan berinvestasi pada keterampilan tenaga kerja rakyatnya. Keterampilan untuk secara produktif mengubah pengetahuan dan informasi menjadi produk dan layanan inovatif akan menjadi penentu keberhasilan ekonomi. Ia juga menambahkan bahwa pengetahuan dan informasi telah menjadi sumber terpenting untuk produktivitas, daya saing, serta peningkatan kekayaan dan kemakmuran, oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas (Cataraja & Cataraja, 2022).

Dalam penelitian yang dilakukan di sebuah desa di Romania yang berjudul *School Dropout Determinants in Rural Communities: The Effect of Poverty and Family Characteristics* menemukan adapun pengaruh faktor keluarga terhadap putus sekolah, penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin (di mana setidaknya satu orang tua tidak bekerja), orang tua yang tidak memiliki pendidikan (terutama yang berasal dari kelompok etnis Roma), atau orang tua dengan tingkat pendidikan rendah (yang

mengabaikan pendidikan anak), cenderung meniru pola pikir dan contoh dari orang tua mereka, yang menganggap pendidikan bukanlah prioritas dan bahwa bersekolah tidak secara signifikan meningkatkan peluang untuk masa depan yang lebih baik (Nita, Motoi, & Ilie Goga, 2021).

Berdasarkan data yang dibagikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Publikasi Statistik Pendidikan, angka jumlah Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah atau ATS pada tahun 2023/2024 cenderung meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. ATS sendiri merujuk pada anak usia sekolah 6 s.d. 21 tahun yang tidak pernah bersekolah ataupun pernah sekolah namun berhenti di tengah proses belajarnya (putus sekolah) karena berbagai faktor seperti ekonomi, sosial, kesehatan, dan lainnya (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).

**Tabel 1.** Data Angka Putus Sekolah Indonesia

Jenjang	Tahun Ajaran				
	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24
SD	0,24	0,18	0,16	0,17	0,19
SMP	0,39	0,11	0,15	0,14	0,18
SMA	0,55	0,28	0,20	0,20	0,19
SMK	0,65	0,27	0,23	0,23	0,28

Sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Publikasi Statistik Pendidikan. Diakses pada tanggal 20 Maret 2025.

Dalam jurnal yang berjudul *Dropping Out of School: And Its Impact on Primary School in Indonesia* menyebutkan beberapa bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah antara lain yaitu faktor ekonomi keluarga, faktor kurangnya perhatian orang tua, keterbatasan sarana belajar, rendahnya minat belajar, faktor pemahaman orang tua terhadap pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor sosial. Selain itu, putus sekolah juga memiliki dampak negatif seperti menjadi tenaga kerja tidak terlatih, meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan, menjadi objek atau subjek tindak kriminal, serta mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat (Masing & Astuti, 2022).

UNICEF menyebutkan bahwa meningkatnya anak tidak sekolah atau ATS pada tahun 2022 merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19 lalu. *Priority Donor Relations* UNICEF Indonesia Kezia Rahmaningtyas menyatakan bahwa sebelum pandemi, UNICEF telah berhasil membantu pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka anak tidak sekolah, namun dikarenakan pandemi covid19 pada 2020 lalu, jumlah anak putus sekolah di Indonesia meningkat kembali sebesar 4,3 juta dengan alasan yang paling banyak ditemukan adalah dikarenakan kondisi geografis dan ekonomi keluarga yang terpengaruh akibat pandemi. Kondisi ekonomi akibat pandemi yang juga berdampak pada kesempatan kerja bagi masyarakat dan juga menambah jumlah pengangguran akibat PHK ketika pandemi lalu (Purnama, 2022).

Dalam jurnal yang berjudul *Impact of the pandemic on school dropout: Multidimensional analysis* disebutkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan secara tiba-tiba dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran daring menjadi salah satu penyebab siswa putus sekolah. Hal ini terjadi karena metode pembelajaran tradisional harus beradaptasi dengan teknologi baru, sementara banyak guru menghadapi hambatan teknologi yang berkaitan dengan faktor geografis, ekonomi, dan lainnya (Núñez-Naranjo, Núñez-Hernández, Diego, & Berruz-Uca, 2023).

Tingginya angka ATS akan menimbulkan banyak permasalahan. Terlebih saat ini Indonesia sedang mengalami puncak periode bonus demografi yang diproyeksikan terjadi pada periode 2020-2035 yang artinya masyarakat usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Pada masa bonus demografi, persaingan mencari kerja akan semakin ketat dan sulit karena banyaknya masyarakat usia produktif. Hal ini akan menjadi lebih sulit bagi ATS untuk mendapatkan pekerjaan karena kesulitan untuk memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dunia kerja. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia (Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, 2025).

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan akan berimplikasi pada kemungkinan meningkatnya jumlah pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan atau kemiskinan. Kemiskinan mengakibatkan kesenjangan sosial dan kesenjangan sosial mengakibatkan kecemburuan sosial kemudian berlanjut pada

gejalak sosial dan biasanya berakhir pada konflik sosial dan terjadinya suatu tindak kejahatan (Prayetno, 2013).

Pada April 2024 lalu, International Monetary Fund (IMF) melalui World Economic Outlook menyebutkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia ada di angka 5,2%. Hal ini menjadikan Indonesia duduk di posisi pertama ASEAN, tertinggi dibandingkan 6 negara lain yang masuk daftar (Yonatan, 2024).

Di Kota Bekasi sendiri, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 sebesar 7,82%, menurun sebesar 0,08% dari tahun sebelumnya. Meskipun mengalami penurunan, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) tetap menjadi kelompok dengan TPT tertinggi yaitu sebesar 12,33%. Lulusan SMA dengan jumlah sebanyak 32,45 ribu orang dan SMK sebanyak 29,55 ribu orang (Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2024).

Mengutip Elwan Clague (1935) dalam jurnal *High Unemployment, Disrupted Economic Growth and Sustainable Development Goals: Analyzing Unemployment Reduction* menyatakan bahwa perputaran bisnis sangat memengaruhi tingkat ketenagakerjaan dan pengurangan pengangguran. Pengangguran disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya kualitas tenaga kerja, produktivitas kerja, dan kesejahteraan tenaga kerja. Selain itu, terbatasnya kesempatan kerja, tingginya tingkat ketergantungan keluarga, rendahnya kontribusi dan daya serap sektor pembangunan terhadap tenaga kerja, serta belum terhubungnya pendidikan dengan dunia kerja juga turut memengaruhi tingkat pengangguran. Baik secara langsung maupun tidak langsung, pengangguran berdampak pada meningkatnya kemiskinan, kriminalitas, dan masalah sosial ekonomi lainnya (Tjahjanto, 2023).

Dalam mengatasi masalah meningkatnya angka Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (ATS), mencegah meningkatnya angka pengangguran, pengangguran ganda, dan juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah telah membentuk dan mengembangkan beberapa program. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi masalah Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia adalah melalui salah satu program yang diinisiasi oleh Kemendikbud bernama Ayo Kursus.

Program Ayo Kursus dirancang untuk memberikan kesempatan kepada anak usia sekolah tidak sekolah (ATS), lulusan SMA/K dan masyarakat umum dibawah usia 25 tahun

yang tidak bisa melanjutkan sekolah dan juga tidak bisa bekerja untuk agar tetap memperoleh pendidikan yang layak dan dapat meningkatkan kompetensi dirinya melalui program-program kursus dan pelatihan sesuai minat yang telah disediakan dengan dua fokus program pembelajaran yang berbeda yaitu Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW). Dalam implementasinya, PKK dan PKW bekerja sama dengan berbagai mitra seperti Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan perusahaan yang saat ini sudah tersebar di 34 provinsi di Indonesia untuk menyediakan kursus-kursus yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Tujuan dan target dari program ini adalah untuk membantu siswa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, sehingga dapat lebih siap untuk kerja ataupun berwirausaha (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2021).

Mengutip Nelson & Phelps (1966) dalam jurnal *High Unemployment, Disrupted Economic Growth and Sustainable Development Goals: Analyzing Unemployment Reduction* menemukan bahwa tenaga kerja yang lebih terampil dan berpendidikan memiliki modal yang lebih baik untuk memenuhi kualifikasi pekerjaan tertentu (Tjahjanto, 2023).

Investasi pada Pendidikan (terutama pada tahap awal) dan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja sangat penting. Tenaga kerja yang terampil, baik dari jalur akademik maupun pelatihan vokasi, berperan besar dalam membangun industri bernilai tinggi dan mendorong inovasi. Pemerintah perlu memastikan semua orang memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan agar kemajuan ekonomi dan sosial dapat tercapai secara menyeluruh (Kuwar, 2021).

Pendidikan vokasi memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi karena membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan kontribusi terhadap perekonomian. Melalui pemberian keterampilan teknis, pendidikan vokasi mendorong terbukanya lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta peningkatan produktivitas, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pendidikan vokasi juga berperan penting dalam mendorong kemajuan teknologi yang turut mendukung pembangunan ekonomi (Dixit-Bajpai, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, membuktikan bahwa anak putus sekolah dan tingginya angka pengangguran masih menjadi masalah di Indonesia.

Pemerintah telah mengupayakan mengatasi permasalahan tersebut salah satunya melalui program Ayo Kursus. Namun saat ini dunia pendidikan vokasi khususnya nonformal dihadapkan pada beberapa kondisi seperti: 1) Satuan pendidikan vokasi belum sepenuhnya menghasilkan lulusan yang terampil, sementara pasar kerja membutuhkan lulusan yang terampil dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja; 2) Pengembangan bidang keahlian di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi belum semua sejalan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, 2025).

Berdasarkan petunjuk teknis program kecakapan kerja tahun 2025, lembaga kursus pelatihan harus memiliki kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri kerja (DUDIKA), salah satu bentuk kerja samanya adalah berkomitmen kesiapan penyerapan lulusan program PKK di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Namun, berdasarkan hasil pra penelitian yang peneliti lakukan pada tanggal 21 Mei 2025, peneliti menemukan fakta bahwa lembaga kursus penelitian tempat peneliti melakukan penelitian mengaku bahwa memiliki kesulitan mencarikan pekerjaan bagi lulusan program ini. Kendala serupa juga dialami pada LKP Yuwita di Tasikmalaya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap implementasi program PKK di LKP Yuwita Tasikmalaya ditemukan bahwa peserta lulusan program PKK tersebut sulit terserap kerja dikarenakan lapangan pekerjaan dalam dunia tata kecantikan di Tasikmalaya masih terbatas (Komalasari, Darusman, & Hamdan, 2025).

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap program Pendidikan Kecakapan Kerja untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program tersebut dalam mengatasi permasalahan anak putus sekolah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mencegah meningkatnya pengangguran di Indonesia.

Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) merupakan program unggulan pemerintah dalam upaya membantu ATS (anak tidak sekolah) untuk mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi untuk bekerja dan terserap di dunia kerja (Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, 2025).

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi dimana dalam program Ayo Kursus ini Dinas Pendidikan Kota Bekasi berperan sebagai unsur pembina

yang bertanggung jawab sebagai evaluator dan monitor pelaksanaan program ini. Selain itu penelitian ini juga dilakukan di salah satu lembaga kursus pelatihan (LKP) di Kota Bekasi yang bekerja sama dengan program Ayo Kursus sebagai penyelenggara pelatihan bagi peserta Program Kecakapan Kerja, serta 2 peserta yang mengikuti program ini hingga selesai.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini mengkaji terhadap pelaksanaan program Pendidikan Kecakapan Kerja untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program tersebut dalam mengatasi permasalahan anak putus sekolah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mencegah meningkatnya pengangguran di Indonesia. Dengan tujuan penelitian semacam itu menuntut pendekatan kualitatif sebagai desain penelitian yang sesuai untuk menguji masalah kontekstual (De Villiers, 2005). Desain kualitatif secara khusus dimaksudkan untuk memberikan informasi yang kaya tentang masalah budaya, manajemen organisasi, serta interaksi manusia (Mahundi, Chaula, & Iqra, 2018).

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dalam buku *Research Methods in Education* oleh Keith Morrison, Lawrence Manion, and Louis Cohen, English dan English (1958) mengemukakan dalam pengertiannya yang paling luas, fenomenologi adalah sudut pandang teoritis yang menganjurkan studi tentang pengalaman langsung yang diterima apa adanya dan yang melihat perilaku sebagai ditentukan oleh fenomena pengalaman daripada oleh realitas eksternal, objektif, dan dijelaskan secara fisik. Selain itu, Denscombe juga mengatakan bahwa fenomenologi cocok untuk penelitian berskala kecil, detail deskriptif dari pengalaman otentik, dan simpati terhadap penelitian humanistik yang berfokus pada 'pengalaman hidup' (Cohen, Manion, & Morrison, 2018).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara fenomenologis dengan partisipan yang terlibat dalam penyelenggaraan program ini. Høffding & Martiny (2016) menjelaskan bahwa wawancara fenomenologis terdiri dari dua tingkatan. Tingkat pertama adalah wawancara langsung yang menekankan hubungan, observasi, dan penggalian deskripsi bernuansa, bukan opini tentang suatu fenomena. Tingkat kedua, yang dimulai setelah wawancara, berfokus pada analisis

deskripsi tersebut untuk menarik kesimpulan fenomenologis yang lebih universal. Deskripsi dari tingkat pertama digunakan untuk mendukung pemahaman fenomenologis yang lebih mendalam pada tingkat kedua (Høffding, Martiny, & Roepstorff, 2021). Moustakas (1994) dalam jurnal yang berjudul *Van Kaam's phenomenology: theoretical-methodological contributions to nursing research* (2022) menguraikan langkah-langkah analisis fenomenologis yang dimodifikasi berdasarkan penelitian metode analisis van Kaam (1966):

1. Horisontalisasi: Pencatatan dan Pengelompokan Awal

Dalam langkah ini, peneliti membaca ulang seluruh transkrip wawancara dari semua partisipan (Dinas Pendidikan, Lembaga Kursus, dan Anak putus sekolah peserta Program PKK)

2. Reduksi dan Eliminasi: Penentuan Konstituen Invarian

Peneliti akan merefleksikan dan menganalisis kembali setiap pernyataan yang telah tercatat. Pernyataan yang bersifat duplikatif atau tidak relevan dengan pertanyaan penelitian akan direduksi dan dieliminasi. Yang dipertahankan adalah ekspresi yang menggambarkan aspek mendasar dari pengalaman, misalnya perasaan, persepsi, atau tantangan peserta.

3. Kategorisasi dan Tematisasi Konstituen Invarian

Peneliti mengelompokkan pernyataan-pernyataan bermakna tadi ke dalam tema-tema inti seperti,

a. Anak Putus Sekolah: 1) Penyebab putus sekolah 2) Motivasi mengikuti program pengembangan diri (PKK) 3) Pengalaman partisipan selama pelaksanaan program Pendidikan Kecakapan Kerja 4) Dampak akhir setelah mengikuti program.

b. Dinas Pendidikan: 1) Peran Dinas Pendidikan dalam mendukung pelaksanaan program.

c. Lembaga Kursus Pelatihan: 1) Peran sebagai fasilitator 2) Pengalaman pelaksanaan program PKK 3) Dampak akhir program terhadap peningkatan keterampilan peserta.

4. Aplikasi dan Validasi: Identifikasi Akhir Konstituen Invarian dan Tema

Peneliti kembali membaca keseluruhan transkrip untuk memastikan bahwa tema-tema yang ditemukan benar-benar merepresentasikan pengalaman partisipan. Langkah ini juga bisa melibatkan validasi ke partisipan (*member checking*), misalnya menanyakan ulang kepada mereka apakah makna yang ditangkap peneliti sudah sesuai.

#### 5. Konstruksi Deskripsi Tekstural Individual

Peneliti akan menyusun deskripsi tekstural individual dari setiap kelompok (Anak Putus Sekolah yang mengikuti program PKK, Dinas Pendidikan, dan Lembaga Kursus). Deskripsi ini akan berfokus pada "apa" yang dialami partisipan, dengan menggunakan ungkapan verbatim (kutipan langsung) dari transkrip wawancara.

#### 6. Konstruksi Deskripsi Struktural Individual

Setelah menyusun deskripsi tekstural, peneliti akan membangun deskripsi struktural individual untuk setiap partisipan. Langkah ini berfokus pada "bagaimana" partisipan mengalami fenomena tersebut, yaitu konteks, kondisi, atau faktor-faktor yang memengaruhi pengalaman mereka.

Peneliti akan mengabstraksi pengalaman individual menjadi sebuah struktur yang menjelaskan esensi pengalaman tersebut, dengan pendekatan pemahaman teoritis (efikasi diri, identitas, agensi) Misalnya: Efikasi diri peserta meningkat karena berhasil menyelesaikan modul pelatihan.

#### 7. Deskripsi Komposit: Konstruksi Deskripsi Struktural-Tekstural

Peneliti menggabungkan seluruh deskripsi tekstural dan struktural dari semua partisipan menjadi satu deskripsi, yaitu gambaran umum tentang makna dan esensi pengalaman anak putus sekolah, dinas pendidikan, dan lembaga pelatihan dalam konteks pelaksanaan program PKK (Galinha-de-Sáa & Velezb, 2022).

### **Hasil dan Pembahasan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa makna dan pengalaman para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program Pendidikan Kecakapan Kerja dalam upaya mengatasi permasalahan anak usia sekolah tidak sekolah (ATS) untuk mencegah pengangguran dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Melalui temuan wawancara mendalam dengan para aktor yang terlibat menunjukkan bahwa kolaborasi antara Pemerintah, Dinas Pendidikan, Lembaga pelaksana program PKK, serta kerja sama dengan DUDIKA untuk memberikan ilmu dan keterampilan bagi anak putus sekolah menunjukkan hasil yang positif bagi peningkatan keterampilan peserta dan membuka peluang kesempatan mereka untuk memiliki pekerjaan yang layak.

### **Identitas Dinas Pendidikan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) tidak hanya lahir dari tuntutan administratif, tetapi juga dari identitas Dinas Pendidikan sebagai lembaga pemerintah dalam sektor pendidikan. Stryker & Burke (2000), mengatakan bahwa dalam penggunaan teori identitas, peran sosial merupakan ekspektasi yang melekat pada posisi-posisi yang ditempati dalam jaringan hubungan; identitas adalah ekspektasi peran yang diinternalisasi (Stryker & Burke, 2000). Peran Dinas Pendidikan Bekasi dalam upaya menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan bentuk langsung dari identitas Dinas Pendidikan sebagai Lembaga Pemerintah dalam sektor pendidikan salah satunya yaitu dengan menjalankan peran dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program Pendidikan Kecakapan Kerja. Peran Dinas Pendidikan dalam program PKK adalah sebagai unsur pembina yang bertanggung jawab sebagai pihak yang memverifikasi dan mengonfirmasi kelayakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang ingin menjadi bagian dari program PKK ini. Dalam hal ini, pengalaman para partisipan menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan memaknai adanya program PKK ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap anak putus sekolah yang tidak mendapatkan Pendidikan formal untuk mengurangi jumlah anak tidak sekolah dengan memberikan keterampilan melalui pendidikan non-formal dan memperbaiki peluang ekonomi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa identitas Dinas Pendidikan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pendidikan masyarakat.

Pada pelaksanaan program ini, Bidang Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Bekasi memastikan lembaga-lembaga kursus yang terlibat dalam program sesuai dengan standar seperti yang tertera di Petunjuk Teknis pelaksanaan program ini. Mereka bersama-sama dengan tim verifikator yang dibentuk oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap sarana, prasarana, dan kesiapan instruktur sebelum lembaga dapat terlibat dalam program. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Bekasi juga terlibat dalam proses penyebaran informasi kepada sekolah maupun LKP di wilayah Kota Bekasi, memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi terkait pembukaan program dan dapat segera mempersiapkan proposal.

Namun, temuan penelitian memperlihatkan adanya batasan peran yang dijalankan oleh Bidang Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan. Secara teknis peran Dinas Pendidikan adalah sebagai unsur pembina yang bertanggung jawab dalam monitoring dan

evaluasi, dalam praktiknya fungsi itu tidak dijalankan secara penuh oleh Bidang Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Monitoring hasil pelatihan serta lulusan, dan evaluasi dampak program lebih banyak berada di tangan tim pusat dengan sistem pelaporan melalui website yang dilaporkan langaung oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Dinas Pendidikan hanya menerima laporan akhir oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Pengalaman para partisipan pada program ini memperlihatkan bagaimana identitas kelembagaan terbentuk melalui peran dan tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan program ini. Bidang Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Bekasi memaknai diri sebagai pihak yang mendukung serta berperan aktif dalam upaya mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan keterampilan peserta. Bidang Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Bekasi memandang tujuan program dan keyakinan bahwa program PKK ini berhasil memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses pendidikan formal. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan PKK di Kota Bekasi bukan sekadar implementasi kebijakan, tetapi juga ekspresi dari bagaimana lembaga memaknai dirinya dan kontribusinya terhadap pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

### **LKP sebagai Agensi Sosial**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) memaknai perannya dalam Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) melalui bagaimana peran mereka dalam memberikan pelatihan bagi peserta dapat memberikan dampak yang positif bagi peserta. Hal ini menunjukkan bahwa LKP menjalankan perannya sebagai agensi sosial seperti yang dikatakan dalam jurnal yang berjudul *Social Agency as a Continuum* (2020), disebutkan bahwa agensi sosial sebagai tanggung jawab atas dampak sosial dan dalam situasi aspek sosial apapun dapat memengaruhi seberapa besar Rasa Agensi (*Sense of Agency*) yang akan dialami para aktor yang terlibat. Sosial Agensi dapat terwujud berdasarkan 3 dimensi, yang pertama, Agensi sosial (dampak), Agensi Sosial (bersama), dan Agensi Sosial (konteks) (Silver, Tatler, Chakravarthi, & Timmermans, 2021). Dalam hal ini, LKP memaknai keterlibatannya dalam program ini berhasil menciptakan dampak positif yang bisa dilihat melalui perubahan signifikan pada peserta, khususnya dalam peningkatan keterampilan dan kepercayaan diri mereka untuk memasuki dunia usaha,

dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). LKP merasakan *sense of agency* ketika mereka melihat peserta yang sebelumnya tidak memiliki keterampilan kini memiliki bekal kompetensi yang dinilai relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Bagi Lembaga, keberhasilan tersebut bukan hanya diukur dari kemampuan peserta menyelesaikan pelatihan, namun dari transformasi diri peserta yang terlihat dari meningkatnya keyakinan dan kesiapan mereka untuk mencari pekerjaan. Pengalaman ini membuat LKP merasa bahwa peran LKP tidak berhenti pada penyampaian materi pelatihan, tetapi berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas bagi kelompok anak putus sekolah.

Dimensi agensi sosial berikutnya terwujud melalui tindakan bersama yang dilakukan LKP dengan mitra DUDIKA. Meskipun LKP berperan sebagai implementor utama program, pelaksanaan PKK tidak berjalan secara mandiri, salah satunya hubungan kerja sama dengan DUDIKA menjadi faktor penting dalam membentuk agensi sosial yang didapati dari kerja sama antara lembaga pelatihan dan mitra dunia kerja. Dengan kolaborasi ini, kedua pihak secara bersama-sama menciptakan peluang yang memungkinkan peserta untuk terserap dalam DUDIKA (dunia usaha, dunia industri, dunia kerja). Kolaborasi tersebut memperlihatkan bagaimana agensi bersama muncul ketika kedua aktor bekerja menuju tujuan yang sama: memberikan kesempatan kerja bagi peserta setelah pelatihan selesai. Meskipun hasil penelitian mengungkapkan bahwa kerja sama ini tidak selalu menunjukkan hasil yang diinginkan. Realitas di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian antara tuntutan regulasi dimana mewajibkan adanya penyaluran kerja dengan kondisi nyata di dunia industri yang tidak selalu membutuhkan tenaga kerja baru. Kondisi ini dianggap sebagai beban atau tantangan tersendiri bagi LKP yang harus memenuhi persyaratan administratif, sekaligus berhadapan dengan keterbatasan atau tantangan dalam pelaksanaan. Namun meskipun demikian, LKP tetap memaknai kerja sama ini sebagai bagian dari identitas sosial mereka dalam melaksanakan program.

Dimensi ketiga dari agensi sosial terlihat dari konteks sosial yang dibangun LKP selama proses pelatihan berlangsung. Lingkungan belajar yang diciptakan dimulai dari instruktur yang mendampingi secara intensif hingga suasana kelas yang mendorong peserta saling belajar ini membentuk ruang sosial yang kuat dalam memengaruhi motivasi internal peserta. Kehadiran instruktur dan teman sekelas menjadi pendorong bagi peserta dalam memotivasi mereka bahwa mereka mampu mengatasi kesulitan dalam mempelajari

keterampilan baru. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana agensi terbentuk dari tindakan lembaga, serta dari kondisi sosial yang berhasil menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi peserta.

Secara keseluruhan, temuan penelitian memperlihatkan bahwa agensi sosial Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dalam perannya pada pelaksanaan program PKK terwujud dalam tiga dimensi yang saling melengkapi: dampak yang dihasilkan, agensi sosial yang dibangun melalui kolaborasi dengan DUDIKA, serta konteks sosial dalam pelaksanaan pelatihan yang menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta dalam pelaksanaan program PKK di ruang kelas.

LKP memaknai perannya bukan hanya sebagai penyelenggara program, tetapi sebagai lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai agen sosial untuk menciptakan dampak sosial yang positif bagi masyarakat khususnya anak putus sekolah yang menjadi peserta program PKK. Dalam hal ini, agensi sosial mereka tidak hanya terlihat dari tindakan yang dilakukan, tetapi juga dari cara mereka memahami, merespon, dan memberi makna terhadap pengalaman pelaksanaan program PKK.

### **Efikasi Diri**

Mengutip Albert Bandura (1986) dalam jurnal yang berjudul *Validitas Konstruk Academic Self-Efficacy Scale Versi Indonesia*, *Self-efficacy* didefinisikan sebagai keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya dalam melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Rismawati, 2025). Bandura (1977, 1986, 1995, 1997a) mengatakan keyakinan akan efikasi diri dipengaruhi oleh empat sumber informasi utama, yaitu: pencapaian kinerja (*performance accomplishments*), pengalaman vikarius (*vicarious experience*), persuasi verbal (*verbal persuasion*), dan informasi fisiologis yang mencakup evaluasi diri terhadap kondisi fisik dan emosional (*physiological information: self-evaluation of physiological and emotional states*) (van der Bijl & Shortridge-Baggett, 2001). Oleh karena itu, konsep efikasi diri ini digunakan untuk mengukur tingkat efikasi diri anak putus sekolah yang mengikuti program ini serta keyakinan diri mereka terhadap kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas atau mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan ke-empat sumber terbentuknya efikasi diri tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, pemaknaan pengalaman peserta selama mengikuti program pelatihan menunjukkan bahwa efikasi diri mereka terbentuk melalui proses yang bertahap dan dipengaruhi oleh dinamika

pengalaman belajar sehari-hari di ruang kelas selama masa pelatihan yang dialami secara langsung oleh para peserta sehingga menumbuhkan keyakinan atas kemampuan diri mereka sendiri.

Melalui pendekatan fenomenologi, pengalaman tersebut tampak sebagai rangkaian proses yang secara perlahan membangun rasa mampu, rasa percaya diri, dan orientasi baru terhadap masa depan mereka. Dalam pengalaman peserta, pelatihan yang didominasi oleh praktik secara langsung menjadi sumber utama bagi tumbuhnya rasa yakin atas kemampuan diri mereka. Proses mencoba dan mengulang serta melewati kesulitan di awal pelatihan dengan pendampingan oleh instruktur pada saat pelatihan membuat peserta menyadari bahwa diri mereka dapat menguasai keterampilan baru yang sebelumnya terasa sulit. Seiring berjalannya waktu, keberhasilan yang terus bertambah menumbuhkan kepercayaan bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas hingga selesai. Pengalaman menguasai keterampilan atau *performance accomplishments* inilah yang kemudian menjadi fondasi paling kuat dari terbentuknya efikasi diri peserta.

Selain pengalaman langsung, peserta terbukti menumbuhkan efikasi diri melalui pengamatan terhadap keberhasilan teman sekelas selama masa pelatihan atau *Vicarious Experience*. Melihat teman sekelas lebih cepat memahami materi tertentu menumbuhkan dorongan bagi peserta untuk juga ingin paham terkait materi tersebut. Melalui proses melihat keberhasilan orang lain menumbuhkan kepercayaan bahwa keberhasilan orang lain merupakan bukti bahwa keberhasilan tersebut juga dapat dicapai oleh diri mereka sendiri.

*Verbal Persuasion* atau dukungan verbal dari instruktur dan lembaga juga menjadi sumber keyakinan tambahan bagi peserta. Komunikasi yang konsisten, serta memberikan semangat serta bimbingan terhadap peserta selama masa pelatihan juga menumbuhkan efikasi diri peserta meski tidak sekuat ke-dua pengalaman sebelumnya (pengalaman langsung dan pengamatan langsung). Persuasi verbal tersebut terbukti meningkatkan motivasi dan juga menumbuhkan keberanian peserta dalam mengambil langkah seperti memulai melamar pekerjaan yang sebelumnya dirasa tidak percaya diri untuk melakukannya.

*Physiological information* atau informasi fisiologis terhadap kondisi fisik dan emosional peserta selama pelatihan juga menjadi sumber proses terbentuknya efikasi diri. Suasana kelas yang aman, nyaman dan suportif membuat peserta merasa nyaman dalam

pelaksanaan program. Kehadiran instruktur yang sabar dan suportif serta teman di kelas yang saling mendukung menciptakan lingkungan emosional yang stabil, menenangkan, dan memotivasi. Dalam atmosfer sosial seperti ini, kelelahan dan tantangan yang muncul selama proses belajar merupakan sebagai bagian wajar dari proses pengembangan diri yang membuat peserta memiliki kondisi emosional yang lebih positif pada saat masa pelatihan sehingga mendorong mereka untuk bertahan, fokus, berkembang dan terampil.

### **Tantangan**

Temuan penelitian juga menemukan adanya berbagai tantangan yang dialami para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program Pendidikan Kecakapan Kerja. Seperti pengalaman Lembaga Kursus dan Pelatihan yang merupakan implementor pelaksanaan program PKK, melalui hasil wawancara yang mendalam, peneliti menemukan bahwa LKP sering kali dihadapi dengan ketidakpastian mengenai waktu dimulainya program. Ketidakjelasan terkait waktu pelaksanaan ini berdampak pada LKP. LKP menerima informasi bahwa program akan dibuka, lalu LKP melakukan sosialisasi dan penjangkaran peserta lalu mengajukan proposal, tetapi penetapan jadwal dari pusat baru diberikan 3-4 bulan setelahnya, hal ini membuat LKP kehilangan peserta karena jeda waktu antara pendaftaran dan jadwal pelaksanaan terlalu panjang sehingga peserta yang sebelumnya berminat akhirnya tidak lagi dapat dihubungi atau sudah bekerja. Semangat peserta hilang dikarenakan ketidakpastian terkait kapan pelaksanaan pelatihannya. LKP menggambarkan bahwa kondisi ini membuat mereka harus memulai proses dari awal lagi, mencari peserta baru, dan mencoba mempertahankan peserta yang masih memungkinkan untuk mengikuti pelatihan.

Selain itu, ketika pelatihan berlangsung, LKP juga dihadapi tantangan terkait komitmen peserta. Sebagian peserta tidak hadir secara konsisten, ada yang hanya datang pelatihan di awal namun kemudian hilang tanpa kabar, dan ada pula yang berhenti karena mendapatkan pekerjaan sebelum pelatihan selesai. LKP harus terus mengingatkan para peserta untuk masuk setiap harinya, dan memberikan dorongan agar berkomitmen untuk menyelesaikan program melalui pesan *whatsApp*. Adanya peserta yang tidak berkomitmen seperti ini akan berdampak langsung pada LKP, karena jumlah kelulusan dan kehadiran peserta akan menentukan apakah LKP dapat kembali diterima dalam program di tahun

berikutnya. Selain itu hal ini juga akan berdampak bagi peserta dalam kelancaran pelatihan, karena materi yang bersifat praktik membutuhkan kehadiran penuh.

Bidang Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan mengatakan peserta yang tidak berkomitmen sebagai hal yang memang sering terjadi dalam pelaksanaan program ini. Dinas menjelaskan bahwa peserta program PKK sangat bergantung pada minat dan kesadaran mereka sendiri untuk mengikuti program sampai selesai. Mereka memahami bahwa sebagian peserta memiliki kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga memilih bekerja di tengah pelatihan. Hal seperti ini dianggap menjadi bagian dari realitas pelaksanaan program yang menyasar anak tidak sekolah dan kelompok rentan secara ekonomi.

Selain masalah kehadiran dan komitmen, LKP juga menghadapi tuntutan untuk menyalurkan peserta ke dunia kerja. Sementara di lapangan, kebutuhan tenaga kerja tidak selalu tersedia. Meski LKP sudah memiliki MoU dengan berbagai usaha seperti percetakan atau *digital printing*, namun kerja sama tersebut tidak selalu dapat direalisasikan. LKP A menilai di kondisi ekonomi saat ini beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan LKP sedang tidak membuka lowongan justru malah mengurangi tenaga kerja. Namun LKP tetap harus memasukkan laporan penyerapan lulusan ke sistem pelaporan PKK, yang pada akhirnya membuat mereka harus menyesuaikan laporan agar tetap memenuhi standar administrasi program.

Bagi peserta, tantangan utama muncul dari proses belajar itu sendiri. Banyak di antara mereka datang tanpa pengalaman atau pengetahuan dasar mengenai komputer, sehingga materi pelatihan yang bersifat teknis seperti Microsoft Excel yang mengharuskan memahami rumus-rumus terasa sulit diawal. LKP A juga melihat hal ini sebagai tantangan, terdapat beberapa peserta pelatihan butuh pendampingan penuh karena tidak familiar dengan komputer. Ketika mengalami kesulitan memahami materi, mereka membutuhkan pendampingan ekstra dari instruktur. Namun peserta yang sering tidak hadir menjadi semakin tertinggal dan merasa kesulitan mengejar ketertinggalan tersebut. Selain kesulitan dalam memahami materi, peserta juga menghadapi tantangan untuk mempertahankan konsistensi dalam mengikuti pelatihan. Terdapat peserta yang tidak menjalankan komitmennya untuk menyelesaikan pelatihan karena diterima kerja di tengah pelatihan,

karena tuntutan kebutuhan hidup ini yang pada akhirnya membuat mereka untuk lebih memilih bekerja dan memilih berhenti dari pelatihan sebelum masa program berakhir.

## **Conclusion**

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menganalisis makna dan pengalaman para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK). Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (ATS) dan mencegah pengangguran dengan fokus pada peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Dari perspektif Identitas Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam sektor pendidikan, Dinas Pendidikan memaknai perannya sebagai wujud tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Peran utama yang dijalankan adalah sebagai unsur pembina yang bertanggung jawab sebagai monitor dan evaluator serta memverifikasi kelayakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Namun, pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelatihan serta penyerapan lulusan di lapangan lebih dilakukan oleh tim verifikator yang dibentuk oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan (Pusat), Dinas Pendidikan hanya menerima laporan akhir dari LKP. Sementara itu, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) memaknai perannya sebagai agensi sosial yang berhasil memberikan dampak positif. Rasa keberhasilan LKP tumbuh ketika mereka melihat perubahan signifikan pada peserta, terutama dalam peningkatan keterampilan dan kepercayaan diri untuk memasuki dunia kerja. Agensi sosial ini terwujud melalui tiga dimensi, yaitu secara individual memberikan dampak positif, menciptakan agensi bersama melalui kolaborasi dengan DUDIKA untuk penyerapan kerja, dan membangun konteks sosial belajar yang suportif di kelas. Meskipun demikian, LKP merasa ketidakpastian jadwal program menjadi masalah bagi LKP, dan LKP juga merasa kesulitan dalam memenuhi tuntutan penyerapan lulusan yang seringkali tidak realistis dengan kondisi kebutuhan pasar kerja saat ini. Bagi Peserta Program PKK, efikasi diri mereka terbentuk secara bertahap melalui proses pembelajaran di ruang kelas selama masa

pelatihan. Selain itu, efikasi diri peserta juga terbukti meningkat melalui sumber utama pembentukan efikasi diri, seperti melalui *Mastery Experiences* atau pengalaman berhasil secara langsung di mana mereka berhasil menguasai materi teknis yang awalnya sulit dengan melalui metode full praktik yang didampingi oleh instruktur. Selain itu, pembentukan efikasi diri juga didorong oleh *Vicarious Experience* atau melihat keberhasilan teman sekelas, *Verbal Persuasion* atau dukungan dan motivasi verbal dari instruktur terus menerus, serta *Physiological information: Emotional & Physiological States* (suasana kelas yang aman, suportif, dan menyenangkan). Dampak akhir program ini adalah peningkatan kompetensi teknis yang kuat dan tumbuhnya rasa percaya diri peserta untuk melangkah maju menuju dunia kerja atau memulai usaha. Secara keseluruhan, program PKK ini berhasil menjadi wadah penting untuk mengembangkan keterampilan dan membuka peluang karir bagi anak putus sekolah. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran untuk pelaksanaan program PKK ini kedepannya. Yang pertama, bisa ditingkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih banyak yang mengetahui dan tertarik mengikuti program ini. Dinas Pendidikan dan Lembaga Kursus dan Pelatihan juga perlu memperluas jangkauan sosialisasi yang lebih intensif, serta diperlukan seleksi yang lebih ketat di awal guna memastikan peserta yang mendaftar benar-benar memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan program hingga akhir sehingga meminimalisir masalah ketidakhadiran dan berhenti di tengah berjalannya program. Kemudian, Dinas Pendidikan yang berperan sebagai unsur pembina tidak cukup hanya menerima laporan akhir dari LKP meski monitoring dan evaluator pelaksanaan program dilakukan secara langsung melalui instrumen yang diberikan oleh Pusat, namun perlu mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi hasil secara langsung di LKP untuk memastikan kualitas pelaksanaan lebih optimal. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, sangat disarankan untuk melakukan optimalisasi terkait jadwal pelaksanaan program agar memberikan informasi waktu pembukaan dan penetapan secara pasti sehingga terkait pelaksanaan program jelas dan tidak menyebabkan LKP kehilangan peserta. Selain itu, Direktorat Kursus dan Pelatihan juga perlu meninjau kembali tuntutan terhadap indikator penyerapan kerja harus 70% bagi LKP. Sebaiknya, Pemerintah fokus pada penciptaan lapangan kerja agar masyarakat Indonesia termasuk peserta lulusan program Pendidikan Kecakapan Kerja ini bisa terserap kerja. Mengingat Program PKK telah berhasil membekali lulusan dengan

keterampilan dan meningkatkan efikasi diri mereka, langkah selanjutnya yang krusial adalah memastikan ketersediaan lowongan kerja yang memadai.

### Daftar Pustaka

- Cataraja, R. G., & Cataraja, G. D. (2022). Evaluation of the Performance of the Technical Education and Skills Development Authority (Tesda) Training Institutions in Region VIII. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 949.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Kajian Program Indonesia Pintar (PIP): Strategi Penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk Mengikuti Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP)*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .
- Masing, M., & Astuti, K. (2022). DROPPING OUT OF SCHOOL: FACTORS AND ITS IMPACT ON PRIMARY SCHOOL IN INDONESIA. *PSYCHOSOPHIA Journal of Psychology, Religion and Humanity*, 16.
- Purnama, B. E. (2022, June 9). *UNICEF Sebut Jumlah Anak Putus Sekolah di Indonesia Meningkat karena Pandemi*. Retrieved from Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/humaniora/498023/unicef-sebut-jumlah-anak-putus-sekolah-di-indonesia-meningkat-karena-pandemi>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. (2025). *Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Yonatan, A. Z. (2024, July 14). *Intip Tingkat Pengangguran di ASEAN, Indonesia Nomor 1*. Retrieved from GoodStats: <https://goodstats.id/article/intip-tingkat-pengangguran-di-asean-indonesia-nomor-1-cKvXH#:~:text=Sementara%20itu%2C%20International%20Monetary%20Fund,negara%20lain%20yang%20masuk%20daftar.&text=Menyusul%20Indonesia%2C%20Fili pina%20berada%20di,kerja%20tida>
- Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. (2024). *Berita Resmi Statistik*. Bekasi : Badan Pusat Statistik Kota Bekasi.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2021, September 2021). *Peluncuran Program Ayo Kursus, Solusi Masyarakat Tingkatkan Kompetensi Diri di Tengah Pandemi*. Retrieved

- from Peluncuran Program Ayo Kursus, Solusi Masyarakat Tingkatkan Kompetensi Diri di Tengah Pandemi: <https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/7218-peluncuran-program-ayo-kursus-solusi-masyarakat-tingkatkan-k>
- Tjahjanto, H. (2023). High Unemployment, Disrupted Economic Growth and Sustainable Development Goals: Analyzing Unemployment Reduction. *Journal of Scientific Papers ECONOMICS & SOCIOLOGY*, 108.
- Kuwar, P. R. (2021). Impact of Education on Economy. *Triyuga Academic Journal*, 50.
- Dixit-Bajpai, P. (2023). The impact of Vocational Education on Economic Growth and Development across the G20 Countries . *Indian Journal of Vocational Education*, 67.
- Høffding, S., Martiny, K., & Roepstorff, A. (2021). Can we trust the phenomenological interview? Metaphysical, epistemological, and methodological objections. *Springer Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 36-37.
- Galinha-de-Sáa, F. L., & Velezb, M. A. (2022). Van Kaam's phenomenology: theoretical-methodological contributions to nursing research. *Phenomenology Section*, 3.
- Grant, C. (2017). *The Contribution of Education to Economic Growth*. London: Institute of Development Studies (IDS) of UK Department for International Development.
- Mahundi, M. H., Chaula, H. B., & Iqira, F. (2018). Appreciating local variations in standardising health care data collection processes and tools: A case of health management information system in Tanzania. *Wiley Online Library*, 3.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). *Research Methods in Education*. London; New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Stryker, S., & Burke, P. J. (2000). The Past, Present, and Future of an Identity Theory. *American Sociological Association*, 286.
- Mahmudi, M. H., & Suroso. (2014). Efikasi Diri, Dukungan Sosial Dan Penyesuaian Diri Dalam Belajar. *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia*, 187.
- van der Bijl, J. J., & Shortridge-Baggett, L. M. (2001). Self-efficacy: Theory and Measurement. *National Library of Medicine*, 5.
- Rismawati. (2025). Validitas Konstruk Academic Self-Efficacy Scale Versi Indonesia. *Eudaimonia Journal Psychology Universitas Sains Indonesia*.

- Nita, A.-M., Motoi, G., & Ilie Goga, C. (2021). SCHOOL DROPOUT DETERMINANTS IN RURAL COMMUNITIES: THE EFFECT OF POVERTY AND FAMILY CHARACTERISTICS. *Expert Projects Publishing House*, 30.
- Núñez-Naranjo, A. F., Núñez-Hernández, C., Diego, E.-B., & Berruz-Uca, I. (2023). Impact of the pandemic on school dropout: Multidimensional analysis. *Institute of Electrical and Electronics Engineers*, 1.
- Komalasari, E., Darusman, Y., & Hamdan. (2025). Implementasi Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tata Kecantikan Kulit Bantuan Dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. *Community Education Journal*.
- Silver, C. A., Tatler, B. W., Chakravarthi, R., & Timmermans, B. (2021). Social Agency as a Continuum. *Springer Psychonomic Bulletin & Review*, 434.
- Prayetno. (2013). Kausalitas Kemiskinan Terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian). *E-Journal Undiksha*, 44.